

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN ANTASARI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Wedy Anggraini¹, Reno Affrian², Gusti Muhammad Hidayatullah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : widyaanggraini2011@gmail.com

ABSTRAK

Sampah menjadi salah satu persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian serius. permasalahan sampah tidak bagi bisa dianggap masalah sederhana, tetapi masalah kompleks yang dapat menjadi bom waktu yang suatu saat bisa meledak menjadi bencana. permasalahan yang ada ialah masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kurangnya sarana (tempat sampah) yang memadai dan kurangnya kinerja petugas kebersihan dalam mengelola sampah dan membersihkan sampah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Antasari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari cukup baik dilihat dari beberapa indikator. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan sudah cukup baik karena diketahui dan dipahami para petugas/pelaksana seta masyarakat kelurahan antasari. Kedua, tujuan kebijakan cukup baik. Ketiga kejelasan atau realistis cukup baik. Keempat hubungan yang terjadi dengan birokrasi cukup baik. Kelima, sikap mengambil keputusan cukup baik. Keenam, koordinasi antarlembaga cukup baik. Ketejuh, kondisi lingkungan ekonomi cukup baik. Indikator yang kurang baik yakni Pertama, sumber daya masih kurang baik. Kedua, sumber daya non manusia belum tercukupi dengan baik. Ketiga, sarana prasarana masih terbilang kurang mendukung untuk pengelolaan sampah. Faktor Pendukung yakni Pertama, Sumber daya manusia (sdm) , tempat yang belum mendukung pengelolaan sampah di kelurahan antasari seta fasilitas yang masih kurang. Sedangkan Faktor Penghambat pertama, kurangnya sumber daya manusia, kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. kedua, terbatasnya sarana dan prasarana, seperti dana, fasilitas (sarana dan prasarana) sudah tersedia namun dari ketersediaan sumber daya tersebut masih terbilang kurang menunjang untuk mendukung pengelolaan sampah di kelurahan antasari. Disarankan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Luran Antasari untuk mengadakan sosialisasi di Kelurahan Antasari untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah serta melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Antasari berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan tersebut.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

Waste is a crucial issue that requires serious attention. The waste problem cannot be considered a simple one, but rather a complex one that can become a time bomb that could explode into a disaster. The existing problems include the continued misuse of waste by many people, the lack of adequate facilities (trash cans), and the lack of performance of sanitation workers in managing and cleaning up waste. The purpose of this study is to determine the implementation of policies and the factors influencing the implementation of waste management policies in Antasari Village, Hulu Sungai Utara Regency. The implementation of the Waste Management Policy in Antasari Village is quite good, seen from several indicators. First, the size and objectives of the policy are known and understood by the officers/implementers and the community of Antasari Village. Second, the policy objectives are quite good. Third, clarity or realism is quite good. Fourth, the relationship that occurs with the bureaucracy is quite good. Fifth, the attitude of decision-making is quite good. Sixth, coordination between institutions is quite good. Seventh, the economic environment is quite good. Less good indicators are: First, resources are still inadequate. Second, non-human resources are not yet adequately provided. Third, infrastructure is still considered less

supportive for waste management. Supporting factors are: First, clear and measurable objectives of waste management. Second, support and coordination. While the first inhibiting factor is the lack of human resources. The keby will not be successful without the support of human resources of sufficient quality and quantity. Second, limited facilities and infrastructure, such as budget funds, facilities (trash bins). The availability of these resources is still considered less supportive to support waste management in Antasan Village. It is recommended that the Head of the Housing, Residential Areas and Environment Agency of Hulu Sungai Utara Regency and Antasari Village hold outreach in Antasari Village to increase public awareness and knowledge about waste management and also conduct regular evaluations to ensure that waste management in Antasari Village is running well in accordance with the policy.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management

PENDAHULUAN

Sampah menjadi salah satu persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian serius. permasalahan sampah tidak bagi bisa dianggap masalah sederhana, tetapi masalah kompleks yang dapat menjadi bom waktu yang suatu saat bisa meledak menjadi bencana. dengan berkembangnya pembangunan, maka semakin besar pula perhatian pemerintah daerah yang harus dicurahkan untuk mengatasi permasalahan sampah masalah sampah meliputi jumlah bahaya, estetika lingkungan pencemaran udara, dan air, dari bahan berbahaya merembes kedalam tamh, dan sistem pengolahan sampah yang belum memadai, sehingga semakin buruk nya permasalahan lingkungan.

Sampah atau limbah padat perkotaan maupun pedesaan, dibanyak Negara dan kota-kota, menjadi agenda diskusi lingkungan, yang tidak pernah habis dibicarakan kegiatan pembangunan, yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pada akhirnya terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi beban social, yang pada akhirnya ,masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya..

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ditemui, yaitu : masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti membuang sampah di pinggir jalan atau membuang sampah di lahan kosong yang menyebabkan pemandangan yang kurang bagus dan tidak bersih, Kurangnya sarana (tempat sampah) yang memadai seperti tidak tersedianya tempat sampah di pinggir jalan yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan dan banyak membuang di pinggir jalan dan Kurangnya kinerja petugas kebersihan dalam mengelola sampah dan membersihkan sampah mengakibatkan masih banyak sampah yang tertinggal di pinggir jalan dan mengakibatkan pemandangan yang kurang baik di lihat di sekitar jalan.

Penelitian terdahulu Humaidi (2023), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai” IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAMPAH DI DAERAH TEPIAN SUNGAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA PALAMPITAN HULU)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Palampitan Hulu) belum terimplementasikan dengan baik, hal ini terlihat dari indikator belum baik yaitu penyaluran informasi, kejelasan informasi, sasaran, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan masyarakat. Sedangkan indikator yang baik yaitu pembagian wewenang dan tanggung jawab, dan komitmen. Faktor penghambat implementasi kebijakan sampah tersebut

yaitu kurang efektif dalam penyaluran informasi, informasi yang belum jelas, kurangnya kesadaran (partisipasi) dan kepatuhan masyarakat, kurangnya dorongan dari pemerintah, dan kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan faktor pendukung implementasi kebijakan sampah tersebut yaitu wewenang dan tanggung jawab yang sesuai, dan komitmen yang baik. Untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Palampitan Hulu) disarankan Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat, memperbanyak sarana dan prasarana sampah, dan membuat peraturan daerah khusus mengatur kebijakan sampah di daerah tepian sungai agar banjir dapat diminimalisir.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data di ambil dari informan yang berjumlah sembilan orang secara purposive sampling. Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan cara kondensasi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Antasari Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a. Ukuran Kebijakan

Suatu kebijakan harus mempunyai ukuran dan standar sasaran kebijakan, dengan adanya ukuran tersebut dapat mempermudah proses dalam pencapaian tujuan maupun dalam pengimplementasian yang akan di laksanakan oleh warga Kelurahan Antasari dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di kelurahan antasari.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan mengenai ukuran kebijakan bahwa petugas/pelaksana sudah baik karena dapat memahami dan mengerti mengenai ukuran dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari.

Dari hasil observasi di lapangan mengenai ukuran kebijakan sudah baik, karena Pemerintah melaksanakan tugasnya dan berusaha mengoptimalkan kinerjanya dalam pengimplementasian peraturan daerah terkait pengelolaan sampah agar sesuai dengan standar ukuran dan tujuan yang ingin di capai.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan mengenai ukuran kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik karena sudah diketahui dan di pahami semua para petugas/pelaksana tersebut.

b. Tujuan Kebijakan

Sebuah kebijakan harus mempunyai ukuran standar dan sasaran kebijakan, dengan adanya ukuran tersebut dapat mempermudah proses dalam pencapaian tujuan

kebijakan maupun dalam pengimplementasian yang di laksanakan para pengelola Sampah di Kelurahan Antasari bertujuan agar meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar. sehingga dengan adanya tujuan kebijakan yang telah ditentukan maka tentu akan meminimalisir kesalahan maupun gangguan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan mengenai tujuan kebijakan petugas/pelaksana sudah baik karena tujuan untuk membantu menjaga kebersihan lingkungan sudah dijalankan.

Dari hasil observasi di lapangan mengenai tujuan kebijakan kebijakan sudah baik, karena para Petugas dilapangan dalam melaksanakan tugasnya sudah mampu melayani masyarakat sesuai dengan standar yang sudah di tetapkan dan tujuan yang ingin dicapai agar lingkungan lebih tertata dan bersih.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan mengenai tujuan kebijakan Pengelolaan Sampah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik karena sudah di ketahui dan di pahami semua para petugas/pelaksana tersebut.

c. Realistis

Pengukuran kinerja implementasi kebijakan bisa di lakukan menggunakan tingkat keberhasilan dengan syarat bahwa ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran atau tujuan kebijakan tidak realistis untuk diterapkan di tingkat warga, pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan mengenai realistis petugas/pelaksana sudah baik karena Kelurahan Antasari memiliki sistem pengelolaan sampah yang terstruktur, namun masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait sampah yang menumpuk. Untuk mengatasi masalah ini, kelurahan memiliki prosedur yang jelas, yaitu dengan meminta masyarakat untuk memilah sampah dan kemudian menghubungi Dinas PerkimLH untuk melakukan pengangkutan sampah.

Dari hasil observasi di lapangan maka dapat di simpulkan sudah baik .Dinas PerkimLH memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Antasari, yaitu dengan menugaskan petugas Bank Sampah Induk untuk melakukan pengangkutan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa ada koordinasi yang baik antara kelurahan dan dinas terkait dalam mengelola sampah.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan mengenai realistis Pengelolaan Sampah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik karena para petugas kebersihan dan dinas terkait sudah ikut serta dalam penyelesaian masalah yang dialami masyarakat Antasari.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya,

sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal dan mencukupi maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat atau terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Tenaga kebersihan di Kelurahan Antasari dinilai masih kurang baik oleh masyarakat. karena mereka menilai di sebagian tempat masih ada sampah yang tertinggal saat di bersihkan oleh petugas kebersihan.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan kurang baik, tapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja tenaga kebersihan. beberapa masyarakat menyarankan agar tenaga kebersihan lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengelolaan sampah dan perawatan lingkungan, karena masih ada beberapa titik yang mengalami penumpukan sampah.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan oobservasi di atas dapat di simpulkan kembali sumber daya manusia kurang baik karena petugas masih kurang memperhatikan lingkungan sekitar yang mengakibatkan masih ada sebagian sampah yang tertinggal karena kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan dan didukung agar kinerja tenaga kebersihan dapat lebih optimal.

b. Sumber Daya Finansial

Selain sumber daya manusia yang menjadi hal penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program yaitu sumber daya finansial/dana, fasilitas sarana maupun prasarana penunjang yang merupakan pelengkap wajib dalam pelaksanaan suatu program serta sumber daya waktu yang juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas berkenaan dengan sumber non manusia dapat disimpulkan bahwa sumber daya non manusia kurang baik karena masih ada fasilitas (sarana dan prasarana) yang belum tersedia.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan demikian sumber daya non manusia di Kelurahan Antasari masih kurang baik karena masih ada beberapa fasilitas yang belum tercukupi di sebagian tempat, tapi tentang anggaran yang di dikeluarkan untuk Kelurahan Antasari harus transparasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui anggaran tersebut digunakan untuk apa saja.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan masih kurang baik, karena masih ada fasilitas yang belum tercukupi untuk masyarakat Kelurahan Antasari. Fasilitas yang kurang di antaranya seperti tempat sampah yang masih terbilang kurang dan perlu adanya penambahan.

c. Sarana Prasarana

Selain sumber daya manusia yang menjadi hal penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program yaitu sarana dan prasarana penunjang yang merupakan pelengkap wajib dalam pelaksanaan suatu program yang juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang sarana dan prasarana di Kelurahan Antasari kurang baik karena Jumlah tempat sampah di Kelurahan Antasari masih sangat kurang dan tidak memenuhi kebutuhan warga. banyak area yang belum memiliki tempat sampah yang memadai, sehingga warga masih sering menemukan sampah yang berserakan di jalan. tempat sampah yang ada juga tidak cukup untuk menampung sampah warga, sehingga sering penuh dan tidak dapat menampung sampah lagi.

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan sarana dan prasarana di Kelurahan Antasari kurang baik karena kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur pengelolaan sampah di Kelurahan Antasari masih belum memadai. Jumlah tempat sampah tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan aktivitas warga, sehingga warga harus berjalan jauh untuk membuang sampah ke tempat yang tersedia. hal ini tentunya dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan masalah kesehatan bagi warga. untuk itu, perlu dilakukan penambahan jumlah tempat sampah dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah di Kelurahan Antasari. dengan demikian, diharapkan pengelolaan sampah dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga warga dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Kelurahan Antasari masih kurang baik karena masih kurangnya jumlah tempat sampah yang ada di Kelurahan Antasari yang mengakibatkan masyarakat banyak membuang sampah di pinggir jalan atau di lahan kosong.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Sikap Mengambil Keputusan

Sikap mengambil keputusan adalah cara seseorang memilih dan bertindak dalam situasi di mana mereka dihadapkan dengan berbagai pilihan atau keputusan yang harus dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap pengambilan keputusan cukup baik akan Implementasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari.

Berdasarkan hasil observasi diatas tentang sikap mengambil keputusan di keluarkan Antasari cukup baik karna Pemerintah memberikan dukungan nyata untuk pengelolaan sampah di Kelurahan Antasari melalui anggaran dan bantuan. Dukungan ini mencakup pengadaan peralatan, pelatihan tenaga kebersihan, dan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, sikap mengambil keputusan sudah cukup baik karna pemerintah dan kelurahan setempat juga ikut serta dan melakukannya sosialisasi untuk mengambil keputusan tersebut.

b. Hubungan Yang Terjadi Dengan Birokrasi

Hubungan yang terjadi dengan birokrasi sangatlah diperlukan, hal ini agar kelancaran segala kegiatan yang dilaksanakan para pelaksana dapat dijalankan dengan baik yaitu tanpa adanya hambatan yang memungkinkan bisa muncul.

Berdasarkan hasil wawancara diatas hubungan yang terjadi dengan birokrasi sudah cukup karena dinas terkait juga membangun komunikasi yang aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Antasari.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan yang terjadi dengan birokrasi yang ada di Kelurahan Antasari sudah cukup baik di lihat dari saling keterlibatannya pihak dinas dan juga kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulan kembali bahwa hubungan yang terjadi dengan birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari sudah cukup baik, karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka sudah sepantasnya mereka mendukung agar segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

a. Antusiasme Terhadap Tugas

Antusiasme terhadap tugas adalah sikap positif dan semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Orang yang memiliki antusiasme terhadap tugas akan menunjukkan kesediaan dan keinginannya untuk melakukan pekerjaan dengan baik, serta menikmati prosesnya. Mereka cenderung memiliki motivasi yang kuat, fokus, dan tekun dalam menyelesaikan tugas, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Antusiasme terhadap tugas juga dapat mempengaruhi kinerja dan hasil kerja seseorang. Ketika seseorang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap tugasnya, mereka cenderung lebih produktif, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan antusiasme terhadap tugas masih kurang baik,karena kendala utama dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah petugas yang masih kurang teliti terhadap pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan terhadap Implementas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari masih kurang baik,karena petugas masih ada yang kurang teliti dalam memilah sampah yang mengakibatkan ada beberapa sampah yang tertinggal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan masih kurang baik karena masih ada beberapa petugas yang masih kurang teliti dalam hal pengelolaan sampah sehingga ada beberapa sampah yang tertinggal.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menjalankan sebuah program/kebijakan. Dalam komunikasilah pesan-pesan ataupun berbagai informasi terkait pelaksanaan dari suatu program dapat disampaikan. Komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan kesalah pahaman yang menimbulkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan baik. Komunikasi dilakukan antar sesama implementor dan badan terkait (instansi lain) yang perlu berkolaborasi dapat menciptakan komunikasi yang mudah diperoleh kelompok sasaran. Dengan demikian dalam sebuah komunikasi ini diperlukannya dukungan instansi-instansi lain yang dapat menyempurnakan ataupun membantu penerapan program kepada

masyarakat sasaran, dukungan instansi lain ini diperlukan agar segala bentuk kegiatan dapat berjalan dengan mudah serta informasi yang disampaikan akan lebih kuat dan dapat dipercaya masyarakat sehingga masyarakat lebih paham.

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu pola kerjasama dalam melakukan kegiatan tertentu dengan dikerjakan oleh banyak pihak dari suatu organisasi/instansi terkait untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara diatas berkenaan dengan koordinasi antar lembaga terkait dapat disimpulkan bahwa koordinasiantar lembaga terkait antara Kelurahan Antasari dengan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengimplementasikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari sudah baik .

Berdasarkan hasil observasi di atas berkenaan dengan koordinasi antar lembaga sudah baik karena dinas serta kelurahan berkoordinasi terkait masalah kebersihan dan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan yang sudah peneliti lakukan berkenaan dengan koordinasi lembaga yang terkait di kabupaten hulu sungai utara khusus implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kelurahan antasari sudah berjalan dengan baik, di buktikan dengan keterlibatan nya Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kelurahan Antasari sebagai pengelola di Antasari.

b. Kerja sama

Kerjasama dalam melakukan kegiatan tertentu dengan dikerjakan oleh banyak pihak dari suatu organisasi/instansi terkait untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama komunikasi dapat terjalin dengan baik, maka dengan optimalnya dan baiknya pola kerjasama ini akan mencegah berbagai asumsi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sangat kecil dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan antara kerjasama antar lembaga terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari sudah baik karena para pegawai dinas dan kelurahan sama-sama berkerja sama untuk melakukan kegiatan agar membantu terjalannya pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi yang sudah peneliti lakukan kerjasama antar lembaga terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari sudah baik, hal ini di buktikan dengan keterlibatan pegawai dinas langsung untuk mengatur pengelolaan sampah pada Kelurahan Antasari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari ini sudah baik karena bisa dilihat dari wawancara dan observasi para dinas terkait dan Kelurahan Antasari sama sama melakukan kerjasama untuk pengelolaan sampah dan mereka melakukan pertemuan rutin untuk membahas perkembangannya yang akan datang.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut dikarenakan dengan perekonomian yang baik dan memadai maka akan lebih memudahkan bagi pihak pelaksana dan pihak penerima (masyarakat) dalam penerapan kegiatan yang terkait dengan Program tersebut. Ketika keuangan lancar maka banyak kegiatan yang akan terlaksana dengan baik sedangkan ketika keuangan tidak mencukupi dan terasa sulit.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi lingkungan ekonomi cukup baik, karena walaupun tidak terlalu signifikan tetapi tidak menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap ekonomi masyarakat. Peraturan serta kebijakan tersebut memang dibuat hanya untuk mengatur bagaimana mengelola sampah dan menjaga lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi lingkungan ekonomi cukup baik, karena masih ada masyarakat yang mau memilah sampah. Peraturan tersebut memang dibuat hanya untuk mengatur yang baik dan benar agar terciptanya lingkungan yang bersih.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi lingkungan ekonomi cukup baik karena tidak menimbulkan pengaruh yang besar dan negatif terhadap ekonomi masyarakat. Sampah bisa didapatkan gratis dan bernilai guna menghasilkan ekonomi.

b. Kondisi Sosial

Kondisi sosial dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut dikarenakan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama Petugas Lapangan Kelurahan Antasari harus mengerti dengan baik mengenai kondisi di wilayah tertentu agar mereka dapat dengan mudah mengimplementasikan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial di kelurahan Antasari sudah baik, karena para dinas terkait dan kelurahan selalu melibatkan masyarakat setempat dalam permasalahan keperdulian terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi di atas bahwa dapat disimpulkan kondisi sosial di Kelurahan Antasari sudah baik, di lihat dari para petugas pengelola sampah dan masyarakat setempat yang mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk penataan lingkungan atau pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan kembali bahwa kondisi sosial terhadap Kelurahan Antasari sudah baik, hal ini karena jika kondisi sosial disuatu wilayah mendukung atau kondusif maka tentu akan mendorong keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari ini.

c. Kondisi Politik

Kondisi politik disuatu wilayah juga sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan atau proses jalannya implementasi suatu kebijakan, hal ini dikarenakan ketika keadaan politik dalam suatu daerah tidak begitu baik maka dapat menjadi salah satu pemicu dari kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kondisi politik di Kelurahan Antasari kurang baik karena masyarakat cenderung tak acuh terhadap permasalahan sampah.

Berdasarkan hasil observasi diatas dapat di simpulkan bahwa kondisi politik masih kurang baik karena sebagian masyarakat lebih memilih membuang di lahan kosong di banding memilah sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa kondisi politik masih kurang baik dilihat dari masyarakat yang masih membuang sampah dipinggir jalan dari pada memilah sampah dan menjadikan sampah menjadi uang.

B. Faktor- faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Antasari

1. Faktor pendorong

a. Jelas dan terukurnya tujuan pengelolaan sampah

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan mengenai tujuan kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah terlaksana dengan baik yaitu menjadikan sampah bernilai guna bagi masyarakat dan membantu menjaga kebersihan lingkungan. Pengelolaan Sampah memiliki tujuan; Pertama, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kedua, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Dukungan dan koordinasi instansi lain terjalin sebagai bentuk komunikasi dalam segala kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan yang sudah peneliti lakukan berkenaan dengan koordinasi lembaga yang terkait di kabupaten hulu sungai utara khusus implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kelurahan antasari sudah berjalan dengan cukup baik, di buktikan dengan keterlibatan nya Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kelurahan Antasari sebagai pengelola di Antasari.

2. Faktor penghambat

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi di atas dapat di simpulkan kembali sumber daya manusia kurang baik karena petugas masih kurang memperhatikan lingkungan sekitar yang mengakibatkan masih ada sebagian sampah yang tertinggal karena kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan dan didukung agar kinerja tenaga kebersihan dapat lebih optimal.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dikelurahan Antasari masih kurang baik karena masih ada masyarakat yang didepan halaman rumahnya tidak ada tempat sampah yang mengakibatkan masyarakat banyak membuang sampah dipinggir jalan atau dilahan kosong.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari cukup baik dilihat dari beberapa indikator. *Pertama*, ukuran dan tujuan kebijakan cukup baik karena sudah diketahui dan dipahami para petugas/pelaksana seta masyarakat Kelurahan Antasari. *Kedua*, tujuan kebijakan cukup baik karena tujuan untuk membantu menjaga kebersihan lingkungan sudah dijalankan. *Ketiga*, kejelasan atau realistis cukup baik karena Kelurahan Antasari memiliki sistem pengelolaan sampah yang terstruktur. *Keempat*, hubungan yang terjadi dengan birokrasi cukup baik, karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintahan. *Kelima*, sikap mengambil keputusan cukup baik karena akan ada tindak lanjut kebutuhan. *Keenam*, koordinasi antarlembaga cukup baik, dibuktikan dengan keterlibatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan masyarakat. *Ketujuh*, kondisi lingkungan ekonomi cukup baik karena tidak menimbula pengaruh negatif terhadap ekonomi masyarakat. Indikator yang kurang baik yakni *Pertama*, sumber daya masih kurang baik karena kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang cukup. *Kedua*, sumber daya non manusia belum tercukupi dengan baik seperti fasilitas dan lainnya. *Ketiga*, sarana prasarana masih terbilang kurang mendukung untuk pengelolaan sampah di Kelurahan Antasari diantaranya tempat sampah yang kurang memadai, tempat pengelolaan sampah setra kurangnya daya masyarakat mengelola sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari. Faktor pendukung yakni: *Pertama*, Jelas dan terukurnya tujuan pengelolaan sampah. *Kedua*, dukungan dan koordinasi. Faktor penghambat: *Pertama*, kurangnya sumber daya manusia, kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. *Kedua*, terbatasnya sarana dan prasarana, seperti dana anggaran, fasilitas (tempat sampah) ketersediaan sumber daya tersebut masih terbilang kurang menunjang untuk mendukung pengelolaan sampah di Kelurahan Antasari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara

Affrian, Reno. 2023. Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media

Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018, Metode Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak

B. Sore. Uddin. 2017. Kebijakan Publik. Makassar: CV Sah Media



- Dewi, Diah Suluh Kusuma.2020.Buku Ajar Kebijakan Publik Proses,Implementasidan Evaluasi. Yogyakarta: Samedera Biru
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016 Studi Analisis Kebijakan. Bandung ALFABETA
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) ‘Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Pedoman Pengelolaan Sampah Berkelanjutan.
- Laporan Penelitian Pengelolaan Sampah di Kelurahan Antasari (2020). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Setiawan, I. (2025) ‘Fenomena Penggunaan Sepeda Listrikdi Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Sutrisno, E.(2018). Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tim Penyusun. 2022. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1(S1). Amuntai: STIA Amuntai
- Widodo, T. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.